

# Pemko-BP Sepakat Permudah Pengusaha

**BATAM** - Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan sepakat mempermudah pengusaha mendapat perizinan. Harapannya, dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selain menyiapkan hotline, Kepala BP Batam, Lukita membuka layanan ke ponselnya, terkait lahan dan perijinan. Demikian dengan Wakil Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Sebagaimana disampaikan Amsakar Achmad, Kamis (12/4) saat Raker Kadin Batam, pihaknya juga komitmen akan terus meningkatkan pelayanan perizinan. "Dengan mal pelayanan publik (MPP), kita berharap dapat memudahkan bagi masyarakat yang ingin mengurus segala perizinan," jelasnya.

Disampaikan Amsakar, MPP di Batam saat ini menjadi banyak percontohan bagi daerah lainnya. Keberadaan MPP memberikan motivasi tersendiri bagi pihaknya untuk terus memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

"Saya juga selalu pesan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk segera laporkan kepada kami jika ada pelayanan Pemko Batam yang berbelit ataupun ada kendala di sana," katanya.

Amsakar juga menyatakan mendukung langkah BP Batam untuk mempercepat penerbitan IPH. Dengan IPH diakui, akan berpengaruh pada pendapatan Pemko dari sektor BPHTB.

"BPHTB ini menyumbang pendapatan tertinggi. Jadi kalau IPH lancar, target pendapatan daerah juga bisa tercapai," bebernya.

Sementara Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh perizinan yang ada di BP Batam menurut dia harus transparan, cepat dan pasti. Pihaknya juga akan menyiapkan hotline pengaduan layanan perizinan, terutama

terkait lahan, langsung ke nomor telepon selulernya.

"Semua layanan perizinan akan kita perbaiki, seperti IPH yang selama ini masih kendala sudah kita permudah persyaratan dari 17 syarat menjadi tiga," kata Lukita.

Diakui Lukita, proses penerbitan IPH beberapa waktu lalu sempat terhambat, karena banyaknya berkas IPH yang dulu belum terselesaikan. Namun ditegaskannya bahwa BP Batam saat ini akan terus berkomitmen melakukan perbaikan untuk mempercepat proses penerbitan IPH. Kalau IPH lancar, pendapatan daerah (Pemko) juga akan naik.

"BP Batam akan terus berupaya membuat terobosan. Termasuk pemangkasan persyaratan IPH akan segera mungkin kami jalankan, kalau perlu kita terapkan aturan itu. IPH bisa diurus lebih dulu syarat dokumen bisa menyusul, sehingga pelayanan bisa lebih maksimal," katanya.

Sementara Ketua Kadin, Jadi Rajaguguk mengatakan, dikalangan pengusaha antara pihaknya dan Apindo juga akan bersinergi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami menyampaikan juga rekomendasi ke Pemko, BP dan DPRD Batam. Rekomendasi itu bernagkat dari keluhan pengusaha. Diantaranya diminta agar Pemko dan BP sinergi.

"Pengusaha ingin kepastian hukum transformasi di FTZ ke KEK. Keterkaitan pengembangan sektor pariwisata. Sektor ini melibatkan banyak pihak dan bisa mendorong sektor riil," kata Jadi.

Disebutkan, pariwisata sudah diakui bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kegiatan pariwisata, diharapkan dapat membangkitkan gairah dunia usaha. Diminta juga agar ada penanganan ketenagakerjaan yang lebih baik. Karena setiap tahun menjadi persoalan. Kedepan perlu membuka komunikasi dengan para buruh. (mbb)



# Pemko Minta Pengembang Mencegah Ruli

**BATAM** - Pemerintah Kota Batam (Pemko) berharap persatuan pengembang properti, Real Estate Indonesia (REI), ikut mendukung pemerintah dalam menghapuskan rumah bermasalah. Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan saat ini ada 38.868 rumah bermasalah yang tersebar di 42 kelurahan di sembilan kecamatan.

"Kebijakan pemerintah pusat, 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kami harap kawan REI bantu pikirkan untuk selesaikan rumah bermasalah ini. Mungkin ada tipe 27 atau berapa, yang bisa dibangun kawan-kawan," kata Amsakar saat pembukaan Rapat Kerja Daerah DPD REI Khusus Kota Batam, Selasa (10/4).

Bantuan lain yang diharapkan dari pengembang yaitu adanya pembatas antar titik properti. Agar ada lahan bagi pemerintah untuk membangun drainase guna atasi masalah banjir.

"Batujaji banjir, Mukakuning, Batam Centre longsor. Penyebabnya antara satu pengembang dengan pengembang lain tidak dibatasi. Saya berharap ke depan ada support kebijakan pemerintah untuk atasi banjir ini," ujarnya.

Amsakar mengatakan dunia properti ini harus digesa. Karena properti menjadi salah satu sektor usaha yang bisa diandalkan, di tengah lesunya industri manufaktur dan galangan kapal.

Guna mendukung perkembangan properti di Batam, pemerintah telah berikan kemudahan dalam hal perizinan. Seluruh perizinan kini sudah tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Perizinan di MPP sudah terdefinisi secara jelas. Tidak ada alasan untuk menghambat perizinan. Pak Lukita (Kepala BP Batam) juga sudah langsung jawab keluhan kawan-kawan tentang IPH," kata dia.

Izin Peralihan Hak (IPH) atas lahan ini siap diselesaikan oleh BP Batam. Penyelesaiannya bisa dilakukan cukup dengan empat persyaratan.

"Ini luar biasa, akan lebih gerakkan sektor properti di Batam. Sehingga diharapkan bisa mencapai target 7 persen dalam dua tahun.

Dari kondisi ekonomi kita saat ini 2,3 persen," kata Amsakar. (mbb)

